

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Dacey and Moris. *The Conflict of Lcrws*, eight edition Under the General Editorship of JHC Morris, London: Stevens & Sons Limited, 1967.

Fuady, Munir. *Hnkum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Cet. I. Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1999.

Gautama. Sudargo. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Unluk Indonesi*, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

_____ *Hukum Antargolongan* Cet. 11. Jakarta: PT: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Aneka Masalah Dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonβsia. Bandung: "PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Pengantar Hnkum Perdata Internasional Indonesia.Cet. 5. Bandung: Binacipta. 1986.

_ *Hukum Perdata Internasional Indonesia Bnku Kedua*. Cet. 4. Bandung: PT. ERESKO. 1986.

_ *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan*. Cet. 3. Bandung: Alumni, 1998.

Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Unluk Indonesia (1998). Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasiona, Bandung: Akimni, 1984.

Hiiknm Dagang dan Arbitrase Internasional.Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Inlernasional Cet. III, Bandung: Alumni, 1993.

Ancka Perkura Indonesia di Luar Negeri, Cet I, Bandung: Alumni. 1999.

Komentar Aias Peraturan Kepailitan Baru untnk Indonesia (1998), Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Kontrak Dagang Internasional, Himpunan Ceramah, Cet. 1, Bandung: Alumni, "1983.

- Essay in Indonesian Law*, Second Edition, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hukum Perdata biternasional Indonesia*, Buku Ketujuh. Bandung: Alumni, 1981.
- G C Chesire, *Private Inlemational Law*, Sixth Edition, Oxfort at the Claredon Press, 1961.
- Hartono. Siti Soemarti, *Pengantar Hukiim Kepailitcm dan Penundaan Pembayaran, CetII*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1981.
- Hoff, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT. Tatanussa, 2000.
- Garmer, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Publishing Co, 1999.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Cet. 1. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Lee A Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv (Faillissements - Verordening) S. 1905 No. 217jo S. 1906 No. 348 Jis Perpu No. 1/1998 dan UUNo. 4/1998*, Medan: 2001
- Lontoh, Rudhy A.; Kailimang , Denny & Ponto, Benny , *Penyelesaian Utang Pintcmg: Melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Amumni, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Analisa Kritis Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. Cet. 1. Jakarta:CINLES, 2000.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepaililan dan Pengunduran Pembayaran*. Cet. 3. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Susantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. 7. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, Cet II, Jakarta: PT. Bina Cipta. 1982.

Tresna, R. *Komentari HIR*, Cet. XVI, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2000

Winardi. *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*. Bandung: CV Mandar Maju. 1989.

Wood, Philip R. *Law and Practice of International Finance: Principles of International Insolvency*. London: Sweet and Maxwell, 1995.

II. ARTIKEL:

Anisah, Siti. "Alternatif Penyelesaian Utang Piutang Dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Magister Hukum volume 1 No. 1*. (September 1999): 1.

Aryanto, Vincent Didiet. "Mengantisipasi Kebangkrutan Massal." *Media Imhnesia* (26 Maret 1998).

Gaffar. Firoz. "Kepailitan: Penyalahgunaan Hak Oleh Debitur." *Republika* (18 Februari 1998).

Lotulung, Paulus Effendie. "Kendala-Kendala Prosedural Dalam Penerapan Undang-Undang Kepailitan." *Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12, 2001*. hal. 61-62.

Omar, Paul J. "Insolvency in Private International Law: The Rule in Malaysia and Singapore." <<http://www.mlj.com.my/articles/P. Omar2.htm>>. 2 Maret 2002.

Panggabean, HP. "Penerapan Azas-Azas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan." *Jurnal Hukum Bisnis, volume 9, 2000*. hal.28 -34.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1989.

_____. "Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis, volume 12, 2001*, hal. 55-60.

Sjahdeni, Sutan Remy. "Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis, volume 12 (2001)*. hal 42-48.

_____. "Hak Jaminan dan Kepailitan." *Jurnal Hukum Bisnis, volume 11, 2002*, hal. 4-10.

"Pengertian Utang Dalam Kepailitan." *Jurnal Hukum Bisnis, volume 17, 2002*, hal. 55.

Sugarda, Paripurna. P. "Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Bisnis. volume 17. 2002*, hal. 41-42.

Suparman, Eman. "Masalah Kepailitan di Luar Negeri Serta Akibatnya di Indonesia." *Pro Msfia No. 1 Tahun XI* (Januari 1993) hal. 76.

Tumbuan. Fred B.G. "Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Yang Diubah Perpu No. 1/1998." *PPHNewsletter No.33/L* (Juni 1998). hal. 4.

III. MAKALAH

Churchill, Gregory *et al.* "Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan: Suatu Perbandingan Hukum Kepailitan di Amerika Serikat," (Makalah disampaikan untuk Pendidikan Lanjutan Bidang Hukum Kepailitan, Jakarta, 3-19 Agustus 1998). hal. 1.

Jerry Hoff, "Annulment of Preferential Transfers" disampaikan pada Lokakarya Angkatan II Tentang Undang-Undang Kepailitan di Jakarta tanggal 3-14 Agustus 1998.

Kartini Mulyadi, "Hakim Pengawas dan Kurator Dalam Kepailitan Serta Hakim Pengawas dan Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari dengan Tema: Perpu Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Tanggal 29 April 1998 di Jakarta).

"Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan". disajikan pada Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Kurator dan Pengurus Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Kelas Lawyer, di Jakarta, tanggal 12 April 2000.

Marianna Sutadi, SH, " Hukum Acara Pengadilan Niaga", disampaikan pada Lokakarya Angkatan II Tentang Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, tanggal 3-14 Agustus 1998.

Paulus Efendi Lotulung, "Putusan Atas Permohonan Pernyataan Pailit Dan Prosedurnya". disampaikan pada Lokakarya Angkatan II Tentang Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, tanggal 3-14 Agustus 1998.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, *Kitab-Kitab Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*. Oleh Mr. W.A. Engelbrecht dan Mr. E.M.L. Engelbrecht. Leiden: A.W.Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., 1960.

_ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

_ *Peraturan Tentang Kepailitan*. Staatsblad 1905 No.217 juncto Staatsblad 1906 No. 348.

_ *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang U No. 1 Tahun ~1995 LN No. 13 Tahun 1995, TLN 3587.

_ *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 LN No. 138 Tahun 1999. TLN No.3872.

_ *Undang-Undang Tentang Pembaharuan Atas Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* i'v'o. 35 Tahun 1999, LN No. 147 Tahun 1999 TLN No.3879.

_ *Peraturan Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*. Perpu No.1 Tahun 1998 LN No. 87 Tahun 1998, TLN3761.

_ *Peraluan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang*. UU No. 4 Tahun 1998 LN. No. 135 Tahun 1998. TLN 3778 Tahun 1998.

